

## Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

**Ketika** pemerintah daerah di laporan keuangannya bermasalah ada "dalih" Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atau biasa disingkat TP-TGR. Nyamannya. Enaknya. Sedapnya. Meong.

Kalau orang awam punya hutang, bisa mati digebuki penagih hutang, seperti nasabah City Bank (kantor pusatnya di Amerika Serikat) di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Itu lho bank bekas tempatnya kerjanya Malinda Dee, pesakitan penilep uang nasabah City Bank jenis Gold.

Demikian juga kalau orang biasa, kredit motor telat bayar sebulan saja, sudah dikejar-kejar tukang tagih. Kadang-kadang tak peduli keluarganya sedang kena musibah, sang debt collector (penagih utang) tetap memburunya bak singa yang kelaparan. Kalau lewat masa jeda pembayaran, maka motor bisa ditarik lagi, dan duit yang mengredit itu tak bisa diambil lagi, yah dianggap menyewa motorlah selama itu.

Tapi kalau oknum-oknum penggarong duit rakyat apakah demikian? Entahlah.

Apalagi kalau ada kolaborasi khas duet mesra bernyanyi indah di panggung antara TP-TGR dan Inspektorat (pengawas) Daerah yang menangani polemik keuangan daerah, makin nyaman saja pihak-pihak penggarong duit rakyat.

TP-TGR dan Inspektorat (pengawas) Daerah, dua lembaga bentukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini, awalnya bagus karena diharapkan menjadi bagian penyelesaian laporan keuangan daerah yang bermasalah. Namun dalam perkembangannya malah seperti lembaga antibody (jangan ditambah lotion ya), bahkan di beberapa pemerintah daerah, diduga juga suka dapat bagian. Semoga hal ini tak terjadi di Kalbar.

Kenapa akan aktif TP-TGR (maksudnya mulai kerja lebih super keras daripada biasanya), bermula Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp156 miliar. Pemprov Kalbar belum menindaklanjuti temuan itu seluruhnya.

Rekomendasi BPK agar Pemprov segera mengembalikan temuan itu belum seluruhnya disetor ke kas daerah: Panitia khusus (Pansus) anggota DPRD Kalbar meminta hal itu segera diselesaikan.

BPK melaporkan hasil temuan mengenai kerugian daerah provinsi Kalbar sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 11/HP/XIX.PNK /02/2011 tanggal 25 Februari 2011 terdapat 178 kasus atau temuan senilai Rp156.050.046.632,41 dan \$11.709.282,89.

Kerugian daerah yang penanggungjawabnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) non bendahara, terdapat empat kasus dengan nilai kerugian daerah Rp16.720.069.960, dan telah diangsur Rp506.287.000. Artinya, masih tersisa Rp16.213.782.960.

Kerugian daerah yang penanggungjawabnya pihak tiga ada tujuh kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp26.660.042.699,07. Tidak ada angsuran dari pihak ketiga. Sedangkan kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi ada 159 kasus.

Dalam rekomendasi Pansus juga meminta pemerintah provinsi Kalbar, agar segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP-TGR kepada DPRD Provinsi.

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, majelis pertimbangan TP/TGR dapat membedakan kasus yang memang merupakan tugas majelis pertimbangan, dan kasus mana yang masih dalam proses tanggungjawab pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.